

BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

1.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan di universitas islam indonesia. data yang dibutuhkan pada penelitian ini bersifat primer dan sekunder yang digabung menjadi data pokok. Data primer atau data utama pada penelitian ini merupakan data yang didapat melalui pengamatan, wawancara sekaligus diskusi. Pengumpulan data utama dilakukan pada Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas indonesia. Pedoman dalam melakukan wawancara dan diskusi mengikuti aturan ISO 55001:2014 sehingga data yang akan digunakan memenuhi aturan. Pada data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai manajemen aset di universitas indonesia sehingga data yang akan diolah dapat menghasilkan luaran yang baik sekaligus kuat.

1.2 Profil Organisasi

Tahun 1945 pada tanggal 8 Juli indonesia memiliki sebuah perguruan tinggi nasional pertama yaitu Sekolah Tinggi Islam (STI). Setahun setelahnya pada tanggal 10 April 1946 universitas tersebut resmi dioperasikan di kota yogyakarta hingga pada tahun 1948 berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia. Pada awal berdiri, universitas tersebut hanya memiliki empat fakultas yakni Fakultas Pendidikan, Fakultas Agama, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ekonomi.

Saat ini, Universitas Islam Indonesia telah memiliki delapan fakultas yaitu Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Agama Islam, Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Hukum. Kedelapan fakultas tersebut tersebar di kota yogyakarta dan terdapat kawasan terpadu yang merupakan kawasan utama pada Universitas Islam Indonesia. kawasan terpadu berada di Jalan Kaliurang KM. 14,5 Sleman, Yogyakarta.

Tahun 2009 UII mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 tentang kualitas manajemen serta ISO 17025 untuk pengelolaan laboratorium. Tiga tahun setelahnya

yakni pada tahun 2013 BAN-PT memberikan Akreditasi Institusi A kepada Universitas Islam Indonesia dengan skor tertinggi untuk perguruan tinggi swasta.

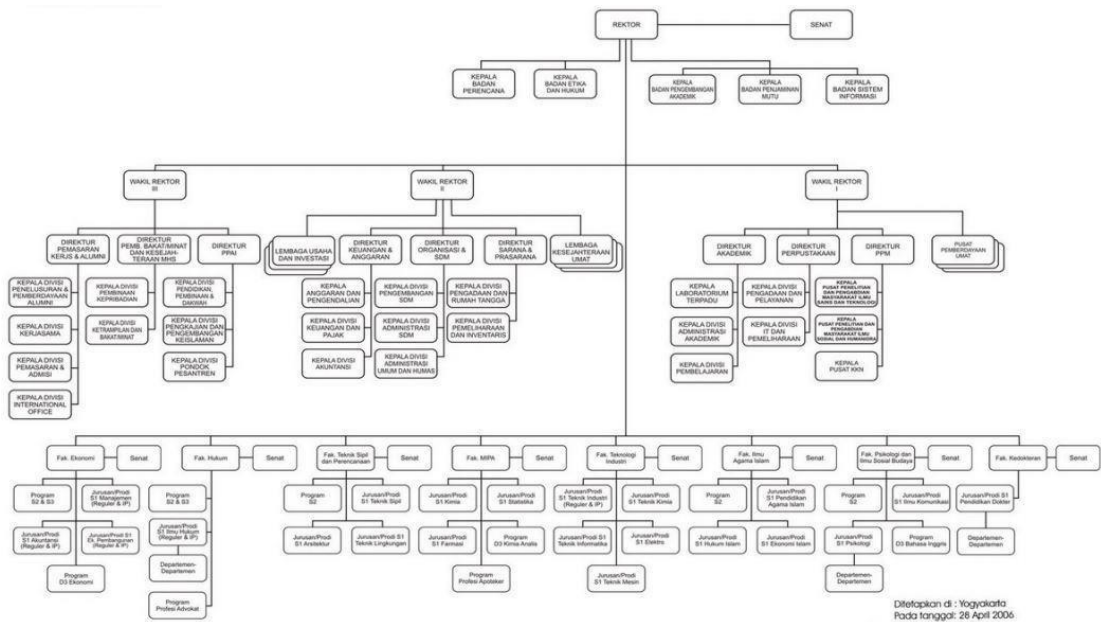
1.3 Visi dan Misi Universitas Islam Indonesia

Universitas Islam Indonesia memiliki visi yaitu terwujudnya universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil 'alamin, mempunyai komitmen pada keunggulan, risalah Islamiyah, di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan dakwah setingkat universitas pada negara-negara maju.

Universitas Islam Indonesia memiliki misi yakni menegakan wahyu ilahi dan sunnah nabi sebagai sumber kebenaran mutlak serta rahmat bagi alam semesta, dan mendukung cita-cita luhur dan suci bangsa Indonesia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui upaya membentuk tenaga ahli dan sarjana muslim yang bertakwa, berakhlak, terampil, berilmu amaliah dan beramal ilmiah, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni yang berjiwa agama Islam, membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridai oleh Allah SWT., serta mendalami, mengembangkan, dan menyebarluaskan pemahaman ajaran Islam untuk dihayati dan diamalkan oleh warga universitas dan masyarakat pada umumnya

1.4 Struktur Organisasi

Pada Gambar 4.1 dibawah ini merupakan struktur organisasi pada Universitas Islam Indonesia sesuai dengan peraturan Pengurus Harian Badan Wakaf (PHBW) Universitas Islam Indonesia No. 03 tahun 2006



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Universitas Islam Indonesia

1.5 Pengolahan Data Primer

1.5.1 Klausul 4

Pada ISO 55001:2014 klausul 4 berfokus kepada Konteks Organisasi. Terdapat 4 sub-klausul yang menunjukkan bagaimana kualitas sebuah organisasi dengan kondisi yang ada pada saat dilakukan penilaian.

1.5.1.1 Sub-Klausul 4.1

Sub-klausul 4.1 yakni pengetahuan mengenai organisasi dan konteks organisasi. Narasumber menjabarkan bagaimana pengetahuan serta konteks organisasi yang menjadi tanggungjawab pada posisi maupun tingkat jabatan tertentu pada sebuah organisasi. Pada Tabel 4.1 berikut merupakan keterangan serta pembobotan yang telah dilakukan.

Tabel 4. 1 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 4.1

Kode	Evidence	Maturity Level
1E	Wakil Dekan sumber daya pada fakultas ekonomi mengerti serta memahami peran, tanggungjawab serta wewenang yang dimilikinya terhadap kebijakan dalam pelaksanaan manajemen aset pada tingkatan fakultas.	3

Tabel 4. 1 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 4.1 (lanjutan)

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
2E	Visi dan Misi pada pelaksanaan pengelolaan aset telah disesuaikan dengan tujuan fakultas sehingga dapat berjalan bersinergi guna mendukung tujuan fakultas.	3
1H	Wakil Dekan SDM pada fakultas hukum telah mengerti dan memahami tanggungjawab serta wewenang yang dimiliki terhadap kebijakan mengenai manajemen aset.	3
2H	Pemahaman mengenai visi misi serta cakupan wewenang menjadikan penerapan kebijakan berjalan dengan baik.	3

1.5.1.2 Sub-Klausul 4.2

Sub-Klausul 4.2 adalah pengetahuan mengenai kebutuhan serta harapan *stakeholder*. Narasumber mengetahui pihak yang berhubungan dengan manajemen aset baik pada pihak internal maupun eksternal serta mengetahui tuntutan pada masing-masing pihak. Keterangan serta pembobotan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 4.2

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Hubungan dengan para <i>stakeholder</i> selalu diperhatikan mengingat penerapan kebijakan yang ada pada tingkatan fakultas harus disesuaikan dengan stakeholder internal maupun eksternal.	3
2E	Kebijakan yang diberikan oleh atasan telah dirumuskan dengan baik dengan pelaporan secara rutin kepada atasan guna menjamin kualitas pengelolaan yang diharapkan.	3

Tabel 4. 2 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 4.2 (lanjutan)

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1H	Hal-hal yang mencakup tentang koordinasi pada hubungan organisasi telah dipahami serta diatur dengan baik. Sehingga implementasi dapat menunjang Visi dan Misi fakultas.	3
2H	Implementasi manajemen aset telah disesuaikan dengan kebutuhan pihak yang berkepentingan mengenai aset pada pihak fakultas.	3

1.5.1.3 Sub-Klausul 4.3

Sub Klausul 4.3 adalah cakupan mengenai sistem manajemen aset. Narasumber memahami mekanisme alur administrasi aset serta aturan yang ada pada aktivitas organisasi. Tabel 4.3 merupakan rekapitulasi pembobotan yang telah dilakukan

Tabel 4. 3 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 4.3

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Wakil Dekan sumber daya pada fakultas ekonomi memahami alur administrasi yang tercantum pada SOP yang telah diberikan oleh badan wakaf, serta tanggungjawab terhadap posisi jabatan di tingkatan fakultas.	3
2E	Pemahaman tentang <i>jobdesk</i> yang diberikan sebagai pimpinan divisi umum dan rumah tangga menjadikan wewenang yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan sesuai.	3
1H	Wakil Dekan SDM pada fakultas hukum memahami alur administrasi yang dibutuhkan serta tanggungjawab terhadap posisi jabatan di tingkatan fakultas.	3
2H	Pemahaman mengenai <i>jobdesk</i> yang ada menjadikan narasumber memahami cakupan serta wewenang pada siklus manajemen aset.	3

1.5.1.4 Sub Klausul 4.4

Sub Klausul 4.4 adalah sistem manajemen aset. Narasumber dituntut untuk dapat menjelaskan mengenai proses bisnis serta strategi yang ada. Tabel 4.4 dibawah merupakan pembobotan yang telah dilakukan.

Tabel 4. 4 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 4.4

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Pemahaman mengenai dinamika yang ada di tingkatan fakultas serta faktor yang mendukung kinerja fakultas menjadikan wakil dekan memiliki gagasan strategi yang optimal yang sedang bertahap dilaksanakan.	2
2E	Narasumber yang telah menduduki jabatan yang sama ada periode sebelumnya menjadikan ia memahami apa yang seharusnya dilakukan serta bagaimana menyikapi dengan peraturan-peraturan yang ada.	2
1H	Narasumber telah mampu memahami serta mengerti bagaimana pelaksanaan sistem manajemen aset yang ada. Namun dalam peningkatan sistem yang ada masih belum ada strategi khusus	1
2H	Pelaksanaan sistem dapat berjalan dengan baik serta narasumber mengetahui strategi pengembangan yang harus dilakukan selanjutnya untuk peningkatan kualitas sistem.	2

1.5.2 Klausul 5

Klausul 5 pada ISO 55001:2014 membahas mengenai kepemimpinan organisasi. Terdapat 3 sub-klausul yang menjabarkan bagaimana penilaian terhadap kualitas kepemimpinan suatu organisasi.

1.5.2.1 Sub Klausul 5.1

Sub Klausul 5.1 adalah Pembahasan komitmen dan kepemimpinan. Narasumber dituntut untuk menjabarkan komitmen serta kapabilitas sebagai seorang pemimpin. Berikut merupakan Tabel 4.5 mengenai pembobotan pada pembahasan ini.

Tabel 4. 5 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 5.1

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Narasumber selaku pimpinan di tingkat fakultas memiliki fokus dalam peningkatan kualitas manajemen yang sudah ada. Dengan masa jabatan yang baru sebentar menjadikan tindakan narasumber mencerminkan komitmen tinggi.	2
2E	Dengan pengalaman pada periode sebelumnya menjadikan narasumber mampu untuk memberikan kualitas yang baik dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan divisi.	2
1H	Narasumber selaku pimpinan di tingkat fakultas telah melakukan tugasnya dengan baik dan selalu berkoordinasi sehingga terjalin kesinambungan.	2
2H	Dalam tingkat pelaksana pimpinan divisi memahami bagaimana langkah yang sesuai. Kesesuaian terhadap SOP selalu dijaga.	2

1.5.2.2 Sub Klausul 5.2

Sub Klausul 5.2 adalah Mekanisme dan Kebijakan. Organisasi harus memiliki sistem mekanisme kerja yang baik dan mendukung agar tercapainya tujuan organisasi. Tabel 4.6 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 6 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 5.2

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Dengan SOP yang sudah ada, wakil dekan dapat memberikan kebijakan yang sesuai pada tingkatan fakultas. Namun, narasumber merupakan wakil dekan yang baru sehingga perlu adanya pemahaman lebih.	1
2E	Kebijakan yang telah disesuaikan dengan visi dan misi fakultas menjadikan mekanisme terhadap <i>jobdesk</i> yang ada dapat berjalan dengan baik.	2
1H	Pemahaman mengenai aturan yang berlaku mengikuti SOP yang sudah ditentukan. Namun, narasumber merupakan wakil dekan yang baru sehingga perlu ditingkatkan.	1
2H	Aturan dan mekanisme yang telah ada dapat membantu tercapainya tujuan namun masih tahap penyesuaian terhadap kebijakan dengan atasan yang baru.	2

1.5.2.3 Klausul 5.3

Sub Klausul 5.3 adalah Peran, Tanggung Jawab, dan Ortorigitas pada suatu organisasi. Fungsi organisasi pada pelaksanaan harus memiliki kejelasan agar dapat berjalan beriringan. Pada Tabel 4.7 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 7 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 5.3

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Penjabaran mengenai SOP dapat dikatakan baik dan sesuai, kebijakan terhadap manajemen aset telah disesuaikan dengan dinamika yang ada. Peran sebagai wakil dekan telah dilakukan dengan baik	3
2E	Terdapat mekanisme khusus yang diterapkan oleh pimpinan divisi agar saat penjalanan fungsi pada fakultas dapat berjalan dengan optimal dan mencapai tujuan manajemen dengan efisien.	3
1H	Pemahaman mengenai peran wakil dekan sudah baik dan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pihak universitas. Sehingga penjalanan wewenang serta pembentukan kebijakan di tingkat fakultas sudah optimal.	3
2H	Narasumber sudah mampu menjalankan fungsi sesuai dengan ketentuan yang ada, namun beberapa penjalanan fungsi jajaran masih belum optimal.	2

1.5.3 Klausul 6

Klausul 6 pada ISO 55001:2014 membahas mengenai Perencanaan. Terdapat 2 sub klausul yang mendukung penilaian terhadap kualitas dari perencanaan organisasi.

1.5.3.1 Sub Klausul 6.1

Sub Klausul 6.1 adalah langkah penanganan resiko. Organisasi harus memiliki langkah dalam pemeliharaan serta penanganan hambatan yang ada. Tabel 4.8 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 8 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 6.1

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Penerapan maintenance yang sudah baik dan dilakukan secara periodik menjadikan kemungkinan terjadinya kerusakan semakin mengecil, namun masih terfokus pada barang yang memiliki umur pemakaian pasti.	2
2E	Mitigasi resiko yang ditekankan pada resiko yang terjadi hanya sebatas <i>report and action</i> . Namun untuk aset yang memiliki umur pemakaian yang pasti seperti AC, Proyektor sudah memiliki mitigasi yang baik dalam pemeliharaan aset.	2
1H	Kebijakan mengenai mekanisme maintenance pada suatu barang sudah baik dalam mengurangi tingkat resiko hambatan yang tidak diinginkan.	2
2H	Informasi yang selalu update dengan langkah <i>actual report</i> serta langkah dalam pencegahan kejadian yang dapat merugikan sudah berjalan dengan baik.	3

1.5.3.2 Sub Klausul 6.2.1

Sub Klausul 6.2.1 adalah tujuan adanya manajemen aset. Dalam melakukan fungsinya, organisasi harus mengerti dan memahami tujuan aset sehingga dapat dipetakan bagaimana langkah dalam mencapainya. Tabel 4.9 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 9 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 6.2.1

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Infrastruktur dan alat penunjang di tingkatan fakultas merupakan bagian kritis sehingga wakil dekan memiliki strategi pengelolaan yang berpusat pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas agar lebih mudah dalam mencapai visi dan misi organisasi	3
2E	Pengadaan, pemeliharaan dan seluruh kegiatan mengenai aset merupakan tanggung jawab utama pada divisi umum dan rumah tangga. Sehingga implementasi yang ada sangat disesuaikan dengan SOP dan kebijakan dari wakil dekan.	2
1H	Pimpinan sudah mengerti pentingnya mengelola sebuah aset agar dapat menunjang segala kebutuhan yang ada. Segala tindakan yang dilakukan dipantau sesuai kewajiban sebagai wakil dekan	2
2H	Visi dan Misi organisasi sudah menjadi patokan untuk sasaran mutu dari pengolahan aset. Pimpinan divisi membuat strategi terhadap tujuan yang dijabarkan oleh pimpinan agar pengelolaan aset menjadi efisien	2

1.5.3.3 Sub Klausul 6.2.2

Sub Klausul 6.2.2 merupakan pembahasan tentang perencanaan dan langkah dalam mencapai tujuan manajemen aset. Setelah memahami tujuan dan fungsi manajemen aset maka dibutuhkan pemetaan yang baik agar dapat menunjang tujuan suatu organisasi. Tabel 4.10 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 10 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 6.2.2

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Evaluasi yang ada pada tahun sebelumnya akan dijabarkan pada RKAT sehingga dalam pengadaan, pembaruan maupun rangkaian aktivitas pada satu tahun kedepan dapat dipetakan dan disetujui oleh badan wakaf.	2
2E	Penjabaran strategi yang akan dilakukan pada satu tahun perjalanan disesuaikan dengan RKAT yang telah dibentuk sehingga pemetaan kegiatan yang harus dilakukan memiliki rangkaian kerja yang baik	2
1H	Dalam perjalanan fungsinya, wakil dekan telah menggunakan RKAT setiap tahun untuk pemetaan kebutuhan mengenai pengelolaan aset. Kegiatan yang diperlukan akan dijabarkan sesuai RKAT yang sudah dibentuk untuk rencana satu tahun.	2
2H	Dengan adanya RKAT yang sudah dibentuk pada awal tahun. Impleentasi dalam pengelolaan aset memiliki framework yang menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan manajemen aset	2

1.5.4 Klausul 7

Klausul 7 pada ISO 55001:2014 membahas mengenai Support System pada manajemen aset. Terdapat 6 sub klausul yang mendukung dalam pembobotan mengenai pembahasan tersebut.

1.5.4.1 Sub Klausul 7.1

Sub Klausul 7.1 adalah Sumber Daya yang ada. Organisasi dalam pelaksanaanya membutuhkan sumber daya yang memiliki kuantitas maupun kualitas yang baik agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tabel 4.11 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 11 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 7.1

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Sumber daya manusia di fakultas ekonomi dirasa sudah optimal dalam menunjang kebutuhan tenaga dalam mencapai tujuan fakultas. Pengadaan fasilitas yang terbaik masih dalam proses guna mendukung sarana di fakultas	2
2E	<i>Jobdesk</i> yang terperinci pada setiap jajaran pada divisi umum dan rumah tangga menjadikan fokus kerja pada setiap staff lebih optimal.	2
1H	Sumber daya yang ada pada fakultas hukum masih dalam tahap peningkatan kualitas maupun kuantitas yang dapat menunjang dari penjalanan organisasi. Dalam hal pengadaan maupun pergantian aset menggunakan mekanisme dengan RKAT.	2
2H	Dengan pengelolaan aset sudah berjalan baik sesuai dengan SOP yang sudah diberikan oleh badan wakaf mulai dari pengadaan, penggantian, pemeliharaan.	2

1.5.4.2 Sub Klausul 7.2

Sub Klausul 7.2 adalah kompetensi Sumber Daya Manusia. Dalam menjalankan fungsi sebuah organisasi maka kualitas sumber daya harus diperhatikan agar dapat berjalan dengan optimal. Tabel 4.12 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 12 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 7.2

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Pengoptimalan kualitas terhadap kuantitas sumber daya manusia merupakan strategi tentang SDM. Pemahaman mengenai <i>jobdesk</i> menjadikan suatu keharusan untuk mencapai tujuan organisasi	2
2E	Pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan dan pelatihan di awal periode jabatan adalah suatu cara agar dapat mengeluarkan potensi yang ada pada setiap staff.	2
1H	Pemilihan strategi yang mengutamakan keefektifan SDM menjadikan kualitas pada sistem yang ada menjadi baik tanpa harus memiliki staff yang berjumlah tinggi.	2
2H	Pendampingan di awal periode jabatan membuat para SDM yang ada menjadi terlatih dan menunjukkan kinerja yang memuaskan walaupun dirasa masih perlu adanya penambahan staff.	2

1.5.4.3 Sub Klausul 7.3

Sub Klausul 7.3 adalah kesadaran akan tanggung jawab pada organisasi. Kesadaran merupakan hal pokok seseorang untuk dapat melakukan apa yang harus dilakukan dengan baik. Tabel 4.13 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 13 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 7.3

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Pemahaman menyeluruh mengenai tanggung jawab serta dinamika yang ada saat menjabat merupakan suatu keharusan. Dan wakil dekan sumber daya sudah memiliki kesadaran tinggi walau baru menjabat periode ini	3
2E	Kesadaran setiap SDM sudah berjalan sesuai yang diharapkan. Namun terkadang masih ada beberapa staff yang masih menyalahi aturan sehingga masih ada beberapa hal yang menyimpang	2
1H	Pemahaman menyeluruh merupakan dasar agar dapat menjalankan fungsi jabatan dengan baik. Namun dengan waktu pergantian periode jabatan yang belum lama membuat wakil dekan yang baru masih membutuhkan waktu agar dapat berjalan dengan optimal.	2
2H	Setelah periode sebelumnya telah menjabat dengan posisi yang sama membuat narasumber sudah sangat memahami dan mengerti tentang bagaimana jobdesk harus dijalankan.	3

1.5.4.4 Sub Klausul 7.4

Sub Klausul 7.4 adalah tentang komunikasi yang ada di setiap elemen organisasi. Kunci utama dari keberhasilan sistem adalah bagaimana komunikasi itu terjalin sehingga membentuk sistem yang terbuka dan berjalan dengan optimal. Tabel 4.14 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 14 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 7.4

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Terdapat pelaporan oleh setiap divisi setiap bulanya. Disisi lain pembawaan sebagai wakil dekan tidak terlalu formal sehingga komunikasi yang terjalin tidak terasa membebani	3
2E	Keterbukaan mengenai kondisi dan masukan di lingkungan internal divisi sangat membantu dalam penyelesaian tanggung jawab. Informasi terhubung setiap saat melalui chat group agar efektif.	3
1H	Controlling terhadap apa yang dikerjakan setiap hari dan pelaporan secara rutin menunjukkan bagaimana strategi yang diterapkan menunjukkan kualitas komunikasi yang baik antar elemen.	3
2H	Strategi yang diterapkan memungkinkan komunikasi terjalin secara terbuka dan dapat dilakukan secara fleksibel saat dibutuhkan.	3

1.5.4.5 Sub Klausul 7.5

Sub Klausul 7.5 adalah kebutuhan informasi pada organisasi. Transparansi data yang bersifat umum perlu dilakukan agar saat melakukan wewenang dapat sesuai dengan kondisi yang ada. Tabel 4.15 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 15 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 7.5

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Pengarsipan seluruh aset telah disesuaikan oleh SOP yang ada, sehingga kebutuhan informasi yang dicatat memenuhi standar informasi. namun belum ada kebijakan khusus dalam kebutuhan informasi aset.	1
2E	Sesuai dengan SOP yang diberikan oleh badan wakaf maka mekanisme serta informasi yang harus dimasukkan kedalam sistem akan sesuai. Disisi lain terdapat sistem informasi internal yang membantu dalam pengarsipan dan kebutuhan informasi lainnya.	2
1H	Pencatatan aset sudah terintegrasi dengan pihak badan wakaf selaku regulator di UII. Mulai dari pengarsipan hingga waktu pemakaian. Namun belum adanya strategi khusus dalam pengolahan data internal	1
2H	Prosedur yang disesuaikan dengan SOP yang telah diberikan oleh badan wakaf menjadikan informasi yang dibutuhkan terpenuhi dengan sistem yang sudah ada.	2

1.5.4.6 Sub Klausul 7.6.1

Sub Klausul 7.6.1 membahas mengenai pengelolaan terhadap informasi yang ada. Pengelolaan pada informasi harus diperhatikan mengingat informasi yang ada sangat membantu dalam penentuan kebijakan sebuah organisasi. Tabel 4.16 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 16 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 7.6.1

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Keseluruhan aset yang ada akan diberikan label dan dimasukkan kedalam sistem guna melakukan pengarsipan data sesuai SOP. Namun hal tersebut dilakukan oleh divisi umum dan rumah tangga.	1
2E	Pengelolaan aset yang ada pada fakultas ekonomi dicatat pada sistem yang terintegrasi oleh badan wakaf selaku badan regulator. Pencatatan juga dilakukan secara independen dalam kebutuhan informasi internal	3
1H	Pentingnya pengelolaan data pada aset sudah disadari dan terdapat sistem untuk penyimpanan data namun dalam pengelolaan data aset divisi umum rumah tangga yang menjalankan mekanisme tersebut.	1
2H	Penyimpanan data informasi sudah menggunakan sistem yang terintegrasi oleh badan wakaf dan belum tersedianya penyimpanan data untuk lingkup internal sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.	2

1.5.4.7 Sub Klausul 7.6.2

Klausul 7.6.2 adalah pencatatan dan pembaruan informasi. Rekapitulasi atau pencatatan aset harus selalu dilakukan dan dikontrol dengan baik agar info yang ada selalu menunjukkan kejadian terbaru saat dibutuhkan. Tabel 4.17 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 17 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 7.6.2

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Mekanisme yang telah berjalan diberikan kepada bagian divisi umum dan rumah tangga. Wakil dekan hanya melakukan <i>controlling</i> dan pemantauan terhadap kinerja yang ada.	1
2E	Pencatatan serta pembaruan pada tingkatan divisi umum dan rumah tangga dilakukan sesuai dengan SOP yang ada sekaligus penambahan data yang dibutuhkan kedalam sistem internal fakultas.	2
1H	Mekanisme pengolahan data terhadap aset diserahkan kepada divisi umum dan rumah tangga sehingga wakil dekan hanya mengontrol dan mengawasi kinerja yang dilakukan namun belum optimal.	1
2H	Pencatatan data aset yang telah dilakukan dengan baik namun hanya saat ada pembaruan atau penggantian barang dan menunggu mekanisme yang harus mendapatkan <i>barcode</i> dari badan wakaf	2

1.5.4.8 Sub Klausul 7.6.3

Sub Klausul 7.6.3 adalah kontrol terhadap informasi yang tersedia. Kebutuhan informasi sangatlah penting karena dapat menentukan strategi yang sesuai dengan kondisi yang ada. Tabel 4.18 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 18 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 7.6.3

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Pencatatan terhadap dokumen dilakukan secara digital dan dapat diakses secara mendadak tanpa harus melakukan pencarian dokumen jika disimpan dalam bentuk cetak.	3
2E	Pencatatan yang telah dilakukan secara sistem disimpan dalam digital sehingga terorganisir dengan baik sehingga dapat diakses dengan optimal	3
1H	Mekanisme yang ada sudah dipahami dan wakil dekan dapat mengakses seluruh informasi yang ada pada sistem. Sehingga ketika informasi yang dibutuhkan dapat diakses tanpa harus menunggu divisi umum.	3
2H	Dalam sistem, divisi umum memiliki satu staff bertugas dalam kelancaran sistem yang ada untuk pengelolaan aset, sehingga ada satu orang yang dapat mengakses secara langsung selain wakil dekan, kepala divisi umum dan rumah tangga.	3

1.5.5 Klausul 8

Klausul 8 pada ISO 55001:2014 membahas mengenai Operasional Perusahaan. Terdapat 3 sub klausul yang menjadi pokok bahasan dalam pengkajian pembobotan kualitas operasional organisasi.

1.5.5.1 Sub Klausul 8.1

Sub Klausul 8.1 adalah perencanaan dan kontrol operasional pada organisasi. Semua kebijakan yang ada harus diawasi sehingga saat penjalanan kebijakan yang ada dapat dilakukan dengan sesuai dan baik. Tabel 4.19 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 19 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 8.1

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Dalam pengelolaan aset dilakukan sesuai RKAT dan SOP yang ada sehingga memiliki rangkaian kerja yang terstruktur sehingga dapat berjalan dengan optimal.	3
2E	Dengan adanya RKAT yang dibentuk oleh wakil dekan dan disetujui oleh badan wakaf maka tanggung jawab dan wewenang yang dilakukan dapat terukur. Pengawasan oleh wakil dekan juga memastikan kesesuaian terhadap RKAT yang ada.	3
1H	Pengawasan terhadap kesesuaian pelaksanaan dan penjalanan fungsi selalu dilakukan agar terjadi kesinambungan sistem kerja. Pengoptimalan kinerja dilakukan dengan menggunakan RKAT yang telah dibentuk.	3
2H	Pengawasan yang dilakukan dalam menjaga kualitas sistem selalu dijaga dan dipantau sehingga aset yang ada dapat terjaga dengan baik.	3

1.5.5.2 Sub Klausul 8.2

Sub Klausul 8.2 membahas mengenai manajemen perubahan. Perubahan terhadap isu-isu internal maupun eksternal sangat dibutuhkan oleh organisasi agar sistem yang ada dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu. Tabel 4.20 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 20 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 8.2

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Perubahan dalam hal peningkatan kualitas dalam pengelolaan aset sudah direncanakan bahkan pada saat awal tahun wakil dekan sudah bertemu dengan badan wakaf untuk gagasan dapat diterapkan.	2
2E	Perubahan yang telah dilakukan lebih banyak perubahan mengenai teknis pelaksanaan saat pengelolaan aset. Sehingga belum melakukan perubahan yang signifikan.	1
1H	Terdapat pemahaman mengenai perubahan yang perlu dilakukan pada sistem yang ada. Namun belum optimal karena tidak adanya pemetaan terhadap apa yang akan dilakukan.	1
2H	Perubahan terhadap kualitas sistem yang ada menunggu dari kebijakan atasan sehingga belum adanya perubahan yang terjadi.	0

1.5.5.3 Sub Klausul 8.3

Sub Klausul 8.3 adalah *Outsourcing*. Kebutuhan tenaga ahli untuk beberapa kasus oleh pihak ketiga dapat terjadi namun perlu adanya pengawasan khusus karena merupakan pihak eksternal pada organisasi. Tabel 4.21 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 21 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 8.3

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	<i>Outsourcing</i> yang dilakukan oleh pihak fakultas adalah sebatas perawatan dan pemasangan alat yang dinilai cukup riskan jika dilakukan pihak internal..	3

Tabel 4. 21 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 8.3 (lanjutan)

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
2E	Saat divisi umum dan rumah tangga akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu sangat pemasangan, perawatan dan juga penggantian aset yang ada. Namun tidak hingga mengenai manajemen yang ada	3
1H	Kebutuhan terhadap tenaga kerja ahli diluar pihak internal organisasi sudah dilakukan untuk menjaga kualitas dari aset yang sensitif terhadap kualitas tenaga kerja.	3
2H	Pemeliharaan dan pengadaan aset sering bekerjasama dengan pihak eksternal agar kualitas dari aset tetap terjaga sehingga penggunaan lebih optimal.	3

1.5.6 Klausul 9

Klausul 9 pada ISO V55001:2014 membahas tentang Evaluasi Kerja pada organisasi. Terdapat 3 sub klausul untuk dikaji pada klausul 9 untuk pemberian bobot penilaian sistem yang ada.

1.5.6.1 Sub Klausul 9.1

Sub Klausul 9.1 membahas tentang pengamatan, penilaian, analisa dan evaluasi. Dalam penjalanan kebijakan yang telah ditetapkan, perlu adanya controlling terhadap kinerja sumber daya sehingga dapat silakukan penyesuaian terhadap dinamika yang ada. Pada Tabel 4.22 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 22 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 9.1

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Pencapaian dan pelaporan yang dilakukan oleh setiap divisi dilakukan setiap bulanya dengan RKAT sebagai acuannya. Pengontrolan dan evaluasi dilakukan sesecara periodik dan akhir taun hingga pembuatan RKAT baru.	3
2E	Sebagai kepala divisi dapat menjabarkan tentang pengawasan terhadap staff yang ada sehingga dapat dilakukan evaluasi agar terjaga kinerja yang sudah baik.	3
1H	Strategi yang diterapkan adalah dengan penggunaan laporan <i>real time</i> melalui aplikasi <i>whatsapp</i> . Sehingga setiap ada kejadian dapat dikontrol secara langsung yang memudahkan dalam tindakan yang akan dilakukan.	3
2H	Pelaporan terhadap kinerja staff kepada pimpinan dilakukan secara periodik sehingga informasi yang ada mencakup keseluruhan implementasi dari kebijakan yang ada.	3

1.5.6.2 Sub Klausul 9.2

Sub Klausul 9.2 membahas mengenai audit internal. Kebutuhan mengenai kondisi terhadap aset diperlukan oleh organisasi sehingga audit harus dilakukan untuk memahami serta menentukan langkah apa yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas sistem. Tabel 4.23 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 23 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 9.2

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Mekanisme audit telah ditetapkan namun belum berjalan dengan optimal karena masa jabatan yang relatif masih baru dan masih perlunya penyesuaian.	1
2E	Sistem audit mengikuti ketentuan yang ada namun pelaksanaannya masih belum dikatakan optimal.	1
1H	Inspeksi dadakan merupakan strategi yang dilakukan agar dapat melihat kondisi secara nyata sehingga pengukuran kualitas dapat sesuai apa adanya.	2
2H	Pimpinan divisi sudah memahami pentingnya audit untuk melihat kondisi yang ada pada aset yang tersedia, namun belum adanya tindakan yang dilakukan.	1

1.5.6.3 Sub Klausul 9.3

Sub Klausul 9.3 adalah peninjauan manajemen pada organisasi. Tinjauan yang dilakukan menunjukkan bahwa organisasi serius dalam menjaga kualitas serta perbaikan kualitas yang ada pada sistem sebuah organisasi. Tabel 4.24 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 24 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 9.3

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Peninjauan masih bersifat <i>report and action</i> serta belum adanya mekanisme yang jelas. Namun wakil dekan selalu mengawasi dan melakukan inspeksi dadakan yang cukup membantu untuk melihat dinamika yang ada.	1

Tabel 4. 24 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 9.3 (lanjutan)

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
2E	Mekanisme yang belum sistematis menjadikan peninjauan yang dilakukan belum terorganisir dengan baik dan perlu adanya perbaikan.	1
1H	Peninjauan masih bersifat <i>report and action</i> serta belum adanya mekanisme yang jelas mengenai hal tersebut sehingga sulit untuk melakukan perbaikan sistem.	1
2H	Belum adanya peninjauan secara khusus yang diterapkan pada sistem sehingga hanya menjalankan SOP yang ada dan melakukan tinjauan saat terjadi kesalahan pada sistem	1

1.5.7 Klausul 10

Klausul 10 pada ISO 55001:2014 yaitu tentang peningkatan kualitas sistem. Terdapat 3 sub klausul yang harus dikaji dalam pemberian bobot penilaian terhadap kualitas sistem.

1.5.7.1 Sub Klausul 10.1

Sub Klausul 10.1 adalah mengenai ketidaksesuaian serta langkah perbaikan. Dengan adanya sebuah penyimpangan aktivitas pada sistem maka tindakan dalam menyikapi hal tersebut adalah sebuah hal yang kritis agar tidak terjadi penyimpangan pada waktu yang mendatang. Tabel 4.25 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 25 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 10.1

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Saat terjadi penyimpangan yang memberikan dampak yang negatif, maka wakil dekan akan melakukan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga ada langkah perbaikan yang dihasilkan.	2

Tabel 4. 25 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 10.1 (lanjutan)

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
2E	Penindakan secara langsung untuk perubahan secara teknis dapat dilakukan agar tujuan tercapai. Namun jika hal itu merupakan dasar dari sebuah aktivitas akan dikonsultasikan kepada wakil dekan untuk disetujui.	2
1H	Penindakan secara preventive merupakan langkah yang dilakukan terhadap penyimpangan pada sistem kerja dan terdapat tindakan saat penyimpangan terjadi melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan saat penyimpangan terjadi.	2
2H	Dengan adanya penyimpangan pada sistem kerja, hanya menjalankan SOP yang ada tanpa adanya evaluasi terhadap penyimpangan yang terjadi	1

1.5.7.2 Sub Klausul 10.2

Sub klausul 10.2 merupakan pencegahan kesalahan dan kegagalan pada sistem. Tindakan preventive merupakan tindakan yang dapat menjaga kualitas dari sebuah aset sehingga kegiatan ini cukup krusial. Tabel 4.26 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 26 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 10.2

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Dengan adanya tindakan pengawasan oleh wakil dekan maka akan diketahui hal apa saja yang perlu dibenahi. Saat permasalahan teknis dapat dilakukan secara cepat.	2
2E	Pengelolaan asset dengan menggunakan kegiatan preventive cukup membantu pencegahan resiko yang tidak diinginkan. Namun	2

Tabel 4. 26 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 10.2 (lanjutan)

Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
	sistem tersebut masih belum optimal karena masih banyak report and action.	
1H	Pencegahan kegagalan sistem menitikberatkan pada umur pemakaian sehingga belum ada mekanisme untuk identifikasi kegagalan aset secara umum.	1
2H	Tindakan pencegahan hanya sebatas pada aset yang memiliki umur pemakaian yang membutuhkan maintenance pasti.	1

1.5.7.3 Sub Klausul 10.3

Sub Klausul 10.3 adalah perbaikan berkelanjutan. Sistem yang baik selalu menyusun strategi pembaruan untuk dapat bersaing sesuai dinamika yang terjadi saat itu. Organisasi harus mampu menyesuaikan diri agar kualitas yang ada semakin meningkat. Tabel 4.27 berikut merupakan pembobotan nilai pada pembahasan ini.

Tabel 4. 27 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 10.3

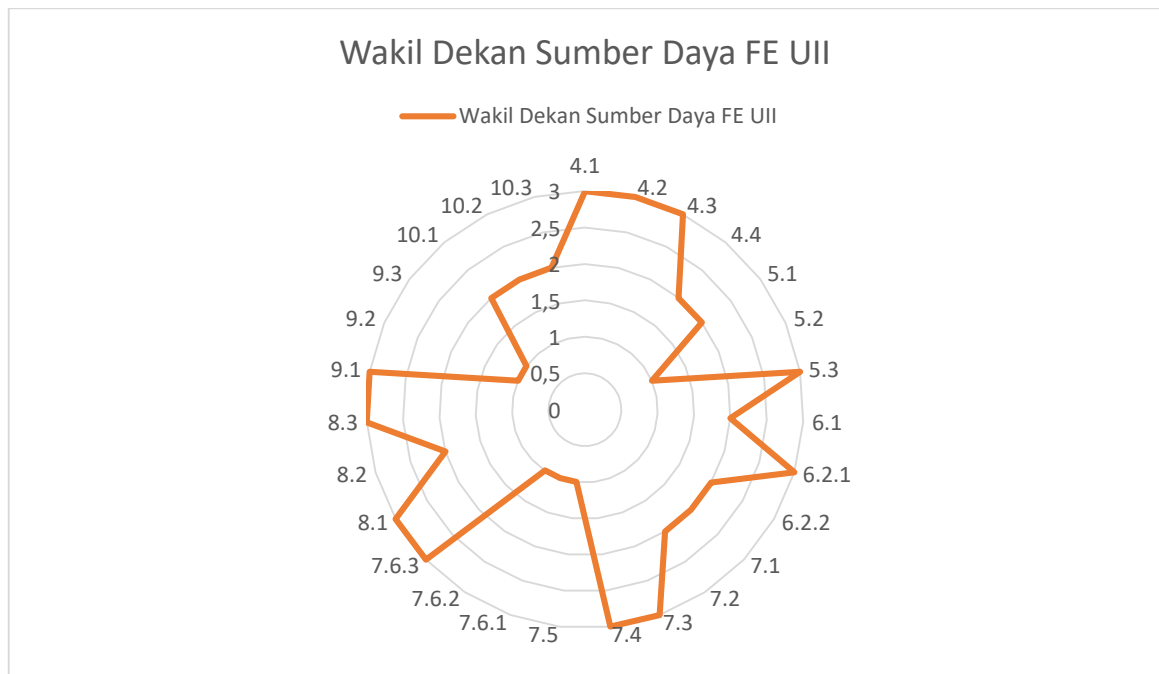
Kode	<i>Evidence</i>	<i>Maturity Level</i>
1E	Kebijakan yang dilakukan oleh wakil dekan salah satunya berupa peningkatan kualitas yang dilakukan berkelanjutan sesuai dengan pemetaan yang telah dilakukan. .	2
2E	Perbaikan dengan skala besar dan berkelanjutan hanya menunggu kebijakan yang ada pada wakil dekan ataupun pihak badan wakaf.	1
1H	Perbaikan sistem secara berskala hanya menunggu kebijakan yang telah diberikan oleh badan wakaf. Tidak adanya inisiatif yang dilakukan terhadap pihak internal fakultas hukum.	1

Tabel 4. 27 Tabel Pembobotan Sub-Klausul 10.3 (lanjutan)

Kode	Evidence	Maturity Level
2H	Perbaikan yang dilakukan sebatas perbaikan yang dapat dilakukan pada saat terjadi penyimpangan. Menitikberatkan pada report and action. Untuk pengembangan hanya mengikuti arahan dari atasan.	1

1.5.8 Radar Pembobotan Kualitas Wakil Dekan FE UII

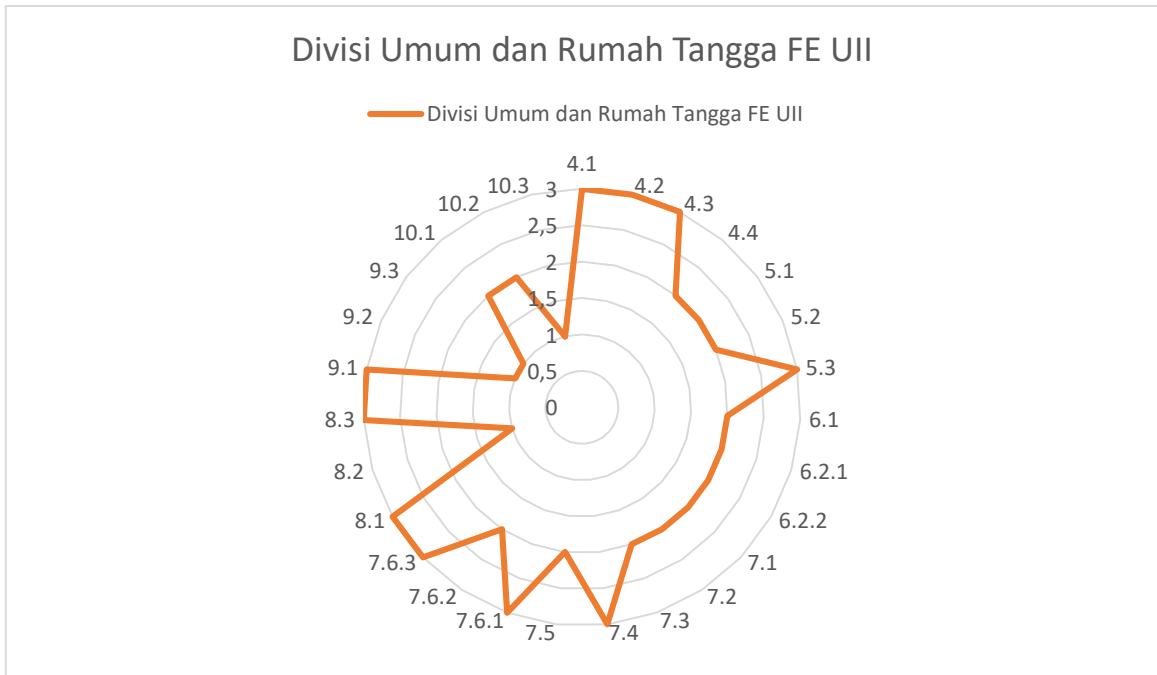
Gambar 4.2 berikut merupakan pengolahan pembobotan nilai kualitas manajemen aset pada wakil dekan sumber daya Fakultas Ekonomi yang dituangkan kedalam *radar chart* sesuai dengan klausul yang ada pada ISO 55001:2014.



Gambar 4. 2 Grafik Tingkat Kematangan Wakil Dekan FE UII

1.5.9 Radar Pembobotan Kualitas Divisi Umum dan Rumah Tangga FE UII

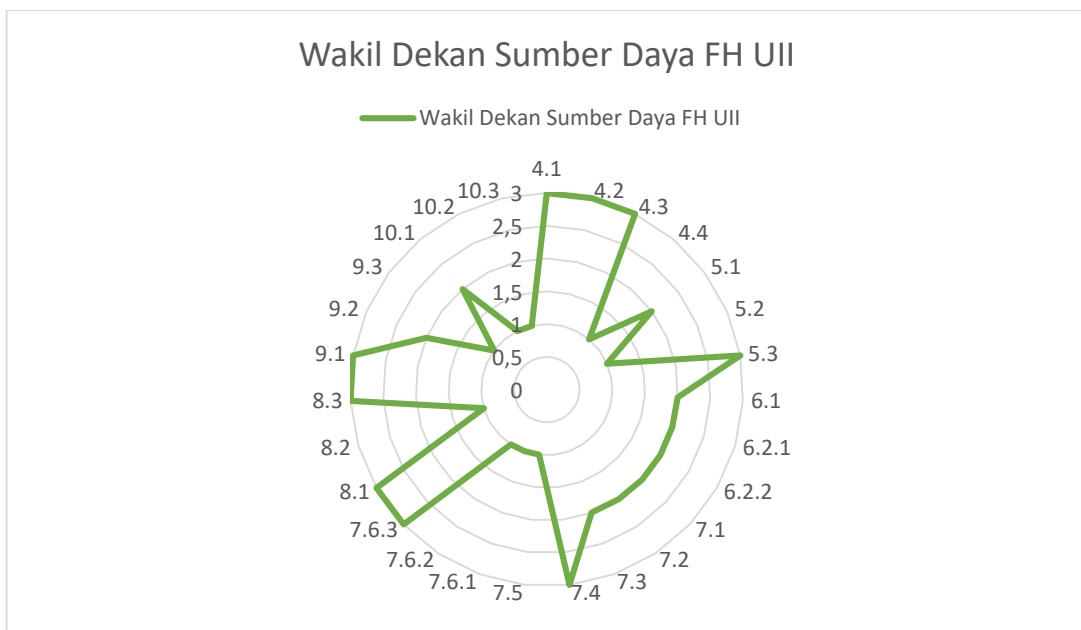
Gambar 4.3 berikut merupakan pengolahan pembobotan nilai kualitas manajemen aset pada divisi umum dan rumah tangga Fakultas Ekonomi yang dituangkan kedalam *radar chart* sesuai dengan klausul yang ada pada ISO 55001:2014.



Gambar 4. 3 Grafik Tingkat Kematangan Divisi URT FE UII

1.5.10 Radar Pembobotan Kualitas Wakil Dekan Sumber Daya FH UII

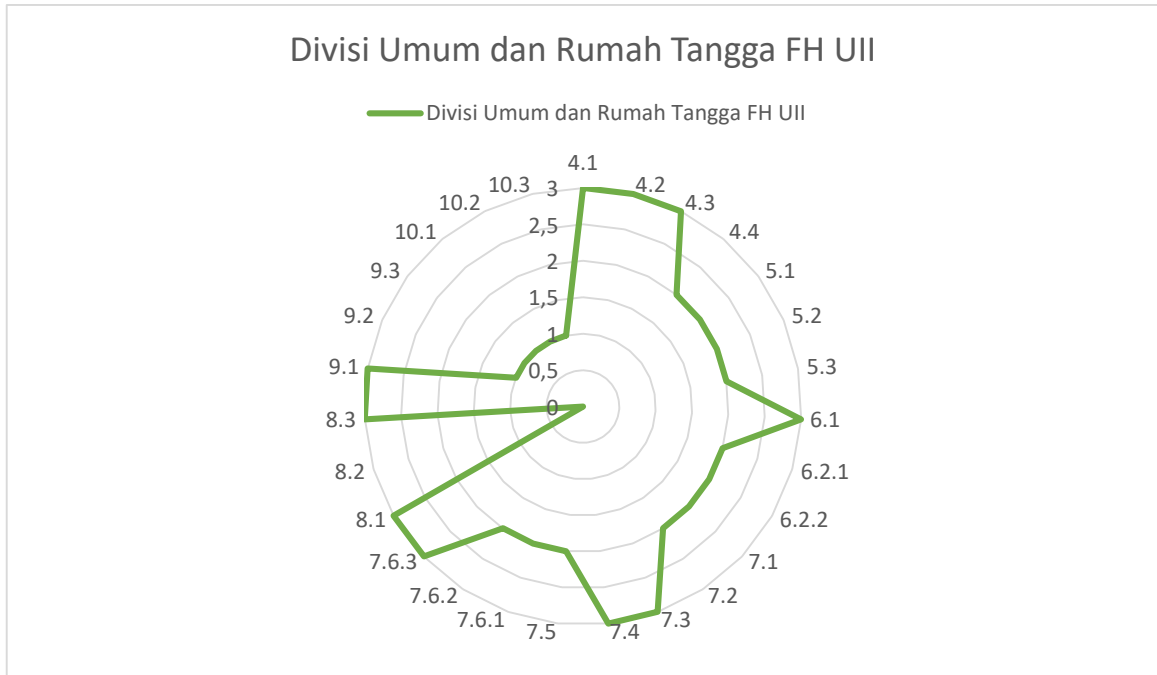
Gambar 4.4 berikut merupakan pengolahan pembobotan nilai kualitas manajemen aset pada wakil dekan sumber daya Fakultas Hukum yang dituangkan kedalam *radar chart* sesuai dengan klausul yang ada pada ISO 55001:2014.



Gambar 4. 4 Grafik Tingkat Kematangan Wakil Dekan FH UII

1.5.11 Radar Pembobotan Kualitas Divisi Umum dan Rumah Tangga FH UII

Gambar 4.5 berikut merupakan pengolahan pembobotan nilai kualitas manajemen aset pada divisi umum dan rumah tangga Fakultas Hukum yang dituangkan kedalam *radar chart* sesuai dengan klausul yang ada pada ISO 55001:2014.



Gambar 4. 5 Grafik Tingkat Kematangan Divisi URT FH UII

1.6 Pengolahan Data Sekunder

1.6.1 Tingkat Kematangan Badan Wakaf UII

1.6.1.1 Pembobotan Tingkat Kematangan Badan Wakaf UII

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai tingkat kematangan manajemen aset pada Badan Wakaf UII. Maka diperoleh data pembobotan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Tabel 4.28 dan Gambar 4.6 berikut merupakan rekapan data pada penelitian sebelumnya.

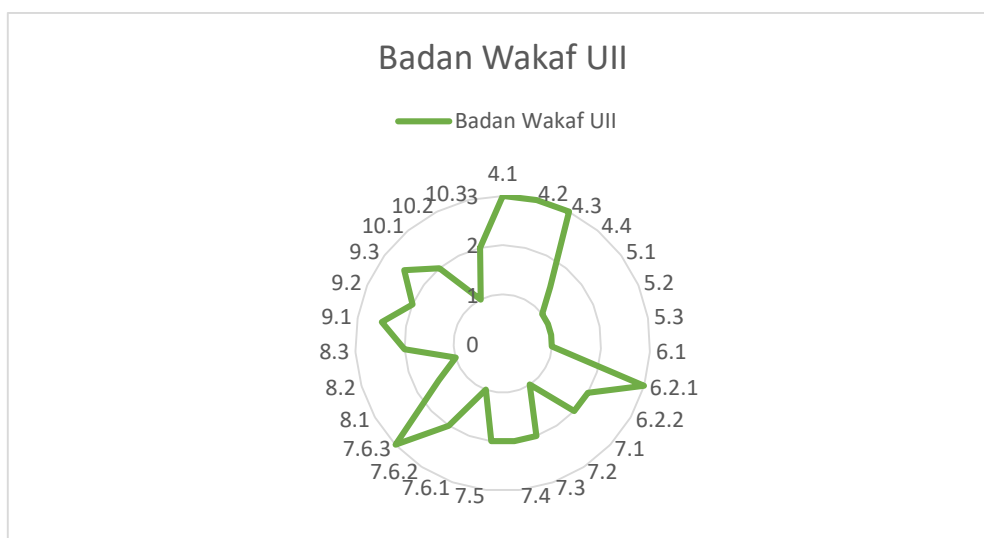
Tabel 4. 28 Tabel Pembobotan Badan Wakaf UII

No.	Sub Klausul	Maturity Level
1	4.1	3
2	4.2	3
3	4.3	3
4	4.4	1.5

Tabel 4. 28 Tabel Pembobotan Badan Wakaf UII (lanjutan)

No.	Sub Klausul	Maturity Level
5	5.1	1
6	5.2	1
7	5.3	1
8	6.1	1
9	6.2.1	3
10	6.2.2	2
11	7.1	2
12	7.2	1
13	7.3	2
14	7.4	2
15	7.5	2
16	7.6.1	1
17	7.6.2	2
18	7.6.3	3
19	8.1	1.5
20	8.2	1
21	8.3	2
22	9.1	2.5
23	9.2	2
24	9.3	2.5
25	10.1	2
26	10.2	1
27	10.3	2

1.6.1.2 Radar Pembobotan Kualitas Badan Wakaf UII



Gambar 4. 6 Grafik Tingkat Kematangan Badan Wakaf UII

1.6.2 Tingkat Kematangan Wakil Rektor 2 UII

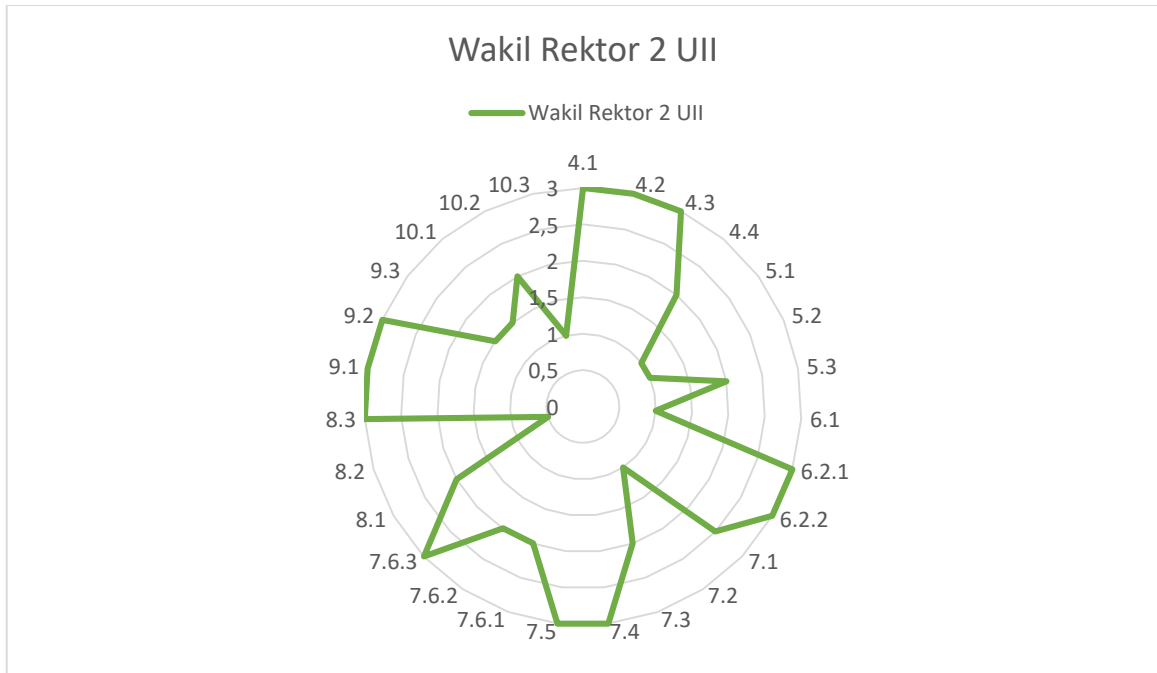
1.6.2.1 Pembobotan Tingkat Kematangan Wakil Rektor 2 UII

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai tingkat kematangan manajemen aset pada Badan Wakil Rektor 2 UII. Maka diperoleh data pembobotan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Tabel 4.29 dan Gambar 4.7 berikut merupakan rekapan data pada penelitian sebelumnya.

Tabel 4. 29 Tabel Pembobotan Wakil Rektor 2 UII

No.	Sub Klausul	<i>Maturity Level</i>
1	4.1	3
2	4.2	3
3	4.3	3
4	4.4	2
5	5.1	1
6	5.2	1
7	5.3	2
8	6.1	1
9	6.2.1	3
10	6.2.2	3
11	7.1	2.5
12	7.2	1
13	7.3	2
14	7.4	3
15	7.5	3
16	7.6.1	2
17	7.6.2	2
18	7.6.3	3
19	8.1	2
20	8.2	0,5
21	8.3	3
22	9.1	3
23	9.2	3
24	9.3	1.5
25	10.1	1.5
26	10.2	2
27	10.3	1

1.6.2.2 Radar Pembobotan Kualitas Wakil rektor 2 UII



Gambar 4. 7 Grafik Tingkat Kematangan Wakil Rektor 2 UII

1.6.3 Tingkat Kematangan Direktorat Sarana dan Prasarana UII

1.6.3.1 Pembobotan Tingkat Kematangan Direktorat Sarana dan Prasarana UII

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai tingkat kematangan manajemen aset pada Direktorat Sarana dan Prasarana UII. Maka diperoleh data pembobotan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Tabel 4.30 dan Gambar 4.8 berikut merupakan rekap data pada penelitian sebelumnya.

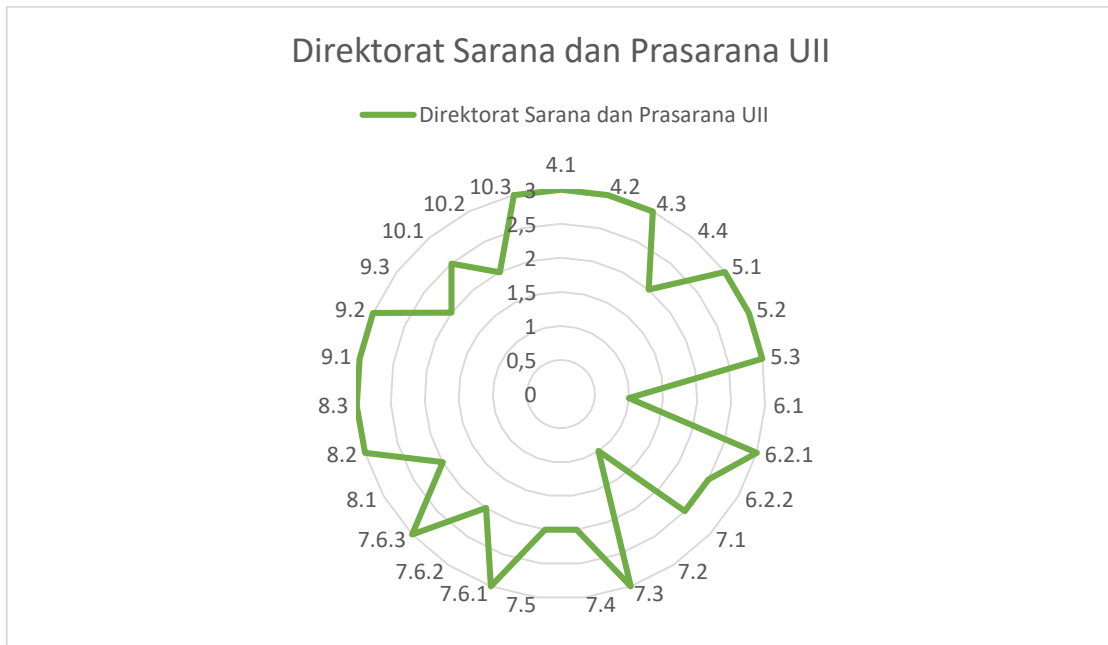
Tabel 4. 30 Tabel Pembobotan Direktorat Sarpras UII

No.	Sub Klausul	Maturity Level
1	4.1	3
2	4.2	3
3	4.3	3
4	4.4	2
5	5.1	3
6	5.2	3
7	5.3	3
8	6.1	1
9	6.2.1	3

Tabel 4. 30 Tabel Pembobotan Direktorat Sarpras UII (lanjutan)

No.	Sub Klausul	Maturity Level
10	6.2.2	2.5
11	7.1	2.5
12	7.2	1
13	7.3	3
14	7.4	2
15	7.5	2
16	7.6.1	3
17	7.6.2	2
18	7.6.3	3
19	8.1	2
20	8.2	3
21	8.3	3
22	9.1	3
23	9.2	3
24	9.3	2
25	10.1	2.5
26	10.2	2
27	10.3	3

1.6.3.2 Radar Pembobotan Kualitas Direktorat Sarana dan Prasarana UII



Gambar 4. 8 Grafik Tingkat Kematangan Direktorat Sarana dan Prasarana UII

1.6.4 Tingkat Kematangan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

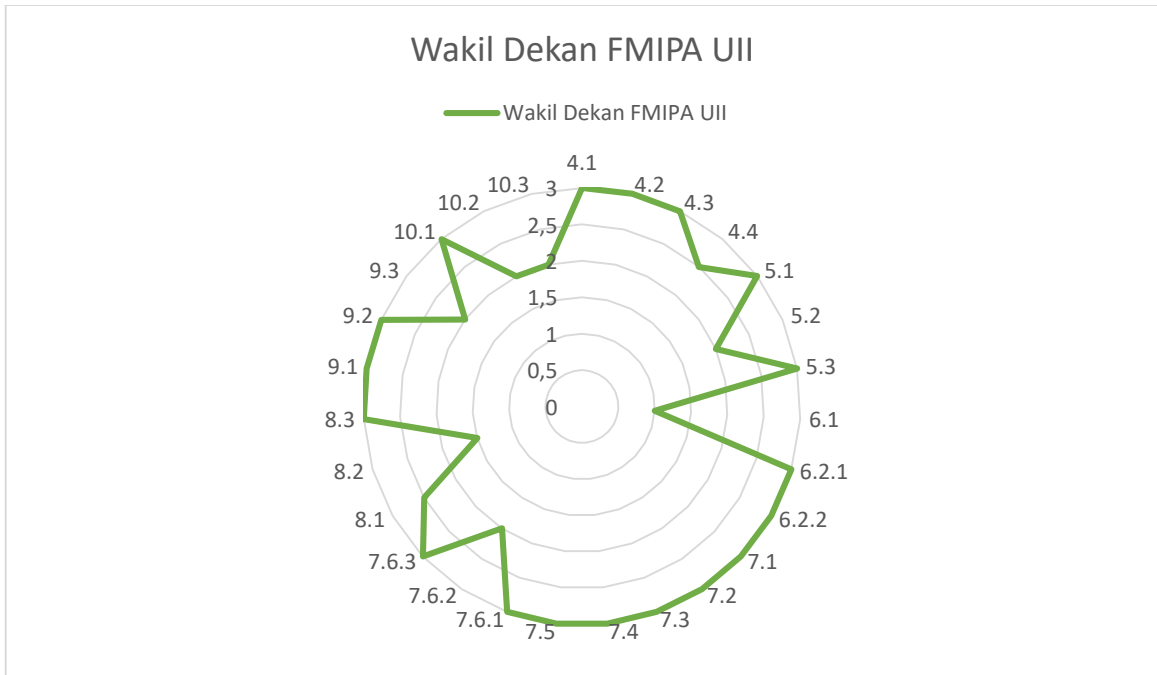
1.6.4.1 Pembobotan Tingkat Kematangan FMIPA UII

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai tingkat kematangan manajemen aset pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UII. Maka diperoleh data pembobotan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Tabel 4.31 dan Gambar 4.9 serta Gambar 4.10 dibawah ini merupakan rekapitan data pada penelitian sebelumnya.

Tabel 4. 31 Tabel Pembobotan FMIPA

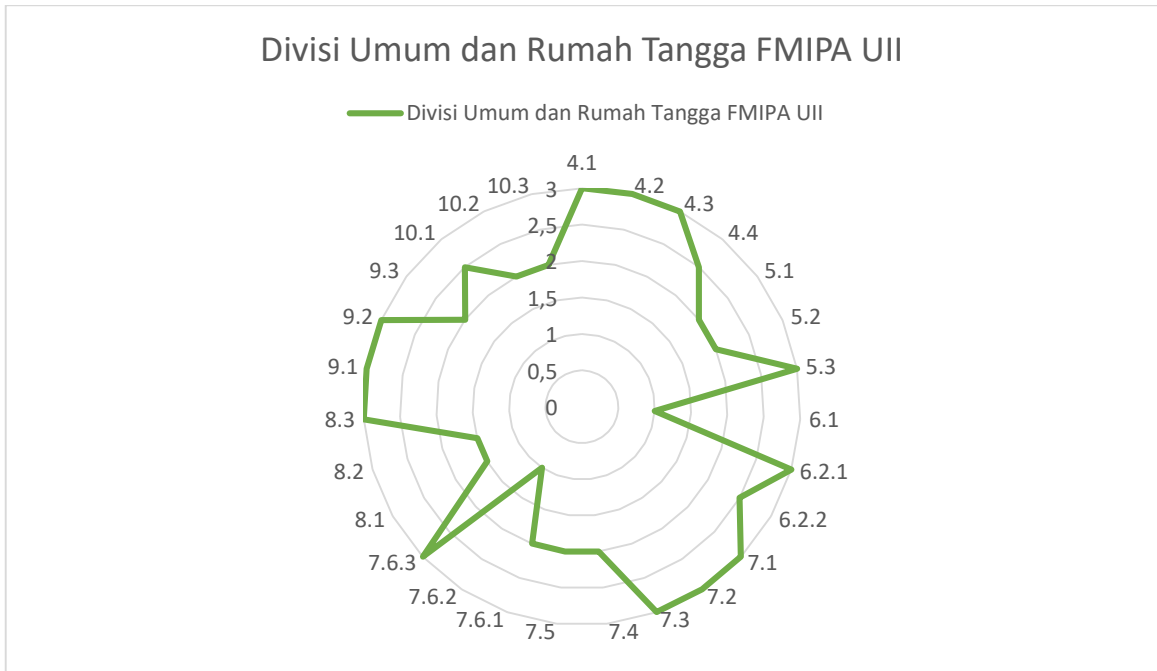
No.	Sub Klausul	Maturity Level	
		Wakil Dekan	Divisi Umum dan Rumah Tangga
1	4.1	3	3
2	4.2	3	3
3	4.3	3	3
4	4.4	2,5	2,5
5	5.1	3	2
6	5.2	2	2
7	5.3	3	3
8	6.1	1	1
9	6.2.1	3	3
10	6.2.2	3	2,5
11	7.1	3	3
12	7.2	3	3
13	7.3	3	3
14	7.4	3	2
15	7.5	3	2
16	7.6.1	3	2
17	7.6.2	2	1
18	7.6.3	3	3
19	8.1	2,5	1,5
20	8.2	1,5	1,5
21	8.3	3	3
22	9.1	3	3
23	9.2	3	3
24	9.3	2	2
25	10.1	3	2,5
26	10.2	2	2
27	10.3	2	2

1.6.4.2 Radar Pembobotan Kualitas Wakil Dekan FMIPA UII



Gambar 4. 9 Grafik Tingkat Kematangan Wakil Dekan FMIPA UII

1.6.4.3 Radar Pembobotan Kualitas Divisi Umum dan Rumah Tangga FMIPA UII



Gambar 4. 10 Grafik Tingkat Kematangan Divisi URT FMIPA UII

1.6.5 Tingkat Kematangan Fakultas Ilmu Agama Islam

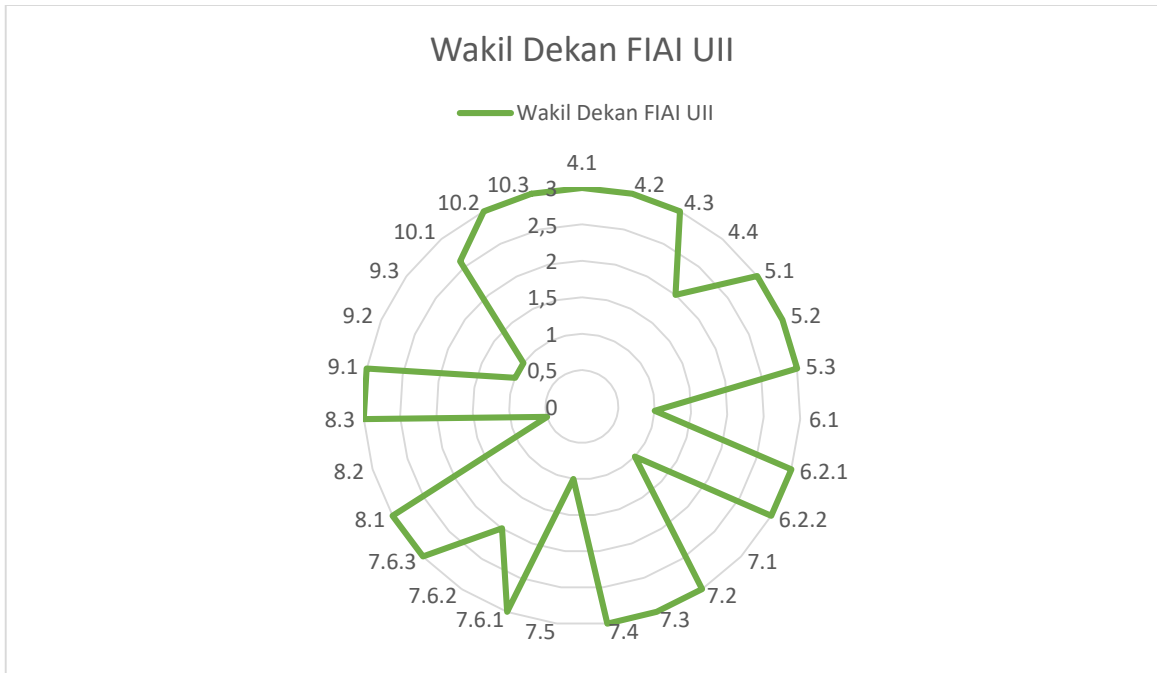
1.6.5.1 Pembobotan Tingkat Kematangan FIAI UII

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai tingkat kematangan manajemen aset pada Fakultas Ilmu Agama Islam UII. Maka diperoleh data pembobotan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Tabel 4.32 dan Gambar 4.11 serta Gambar 4.12 dibawah ini merupakan rekapitan data pada penelitian sebelumnya.

Tabel 4. 32 Tabel Pembobotan FIAI

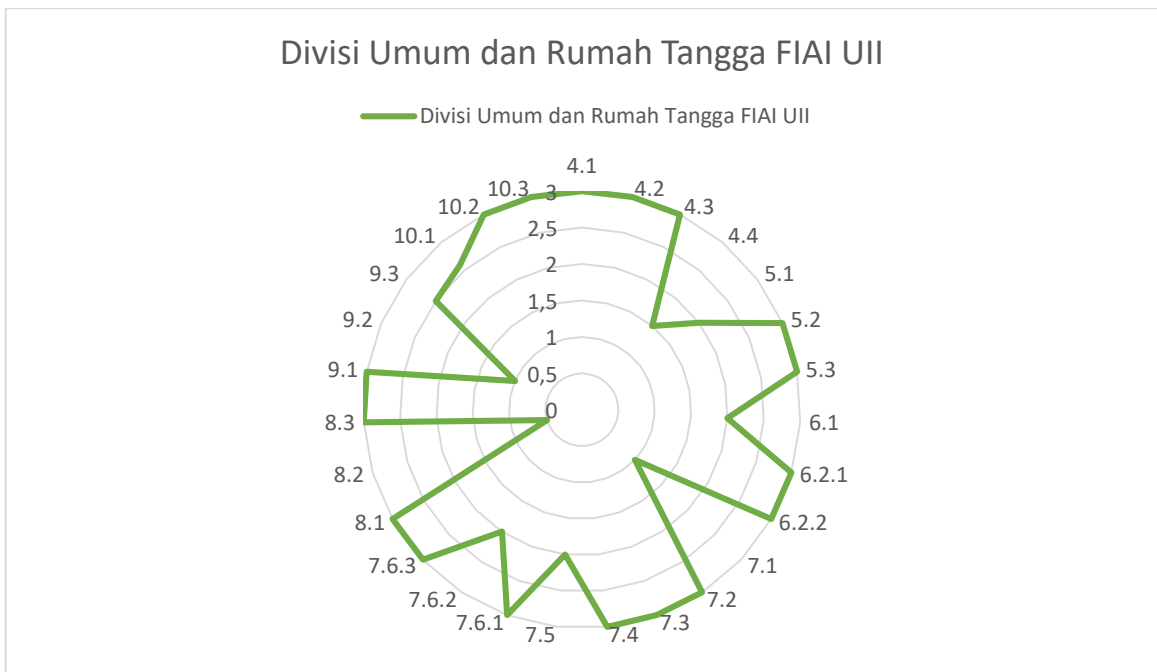
No.	Sub Klausul	Maturity Level	
		Wakil Dekan	Divisi Umum dan Rumah Tangga
1	4.1	3	3
2	4.2	3	3
3	4.3	3	3
4	4.4	2	1,5
5	5.1	3	2
6	5.2	3	3
7	5.3	3	3
8	6.1	1	2
9	6.2.1	3	3
10	6.2.2	3	3
11	7.1	1	1
12	7.2	3	3
13	7.3	3	3
14	7.4	3	3
15	7.5	1	2
16	7.6.1	3	3
17	7.6.2	2	2
18	7.6.3	3	3
19	8.1	3	3
20	8.2	0,5	0,5
21	8.3	3	3
22	9.1	3	3
23	9.2	1	1
24	9.3	1	2,5
25	10.1	2,6	2,6
26	10.2	3	3
27	10.3	3	3

1.6.5.2 Radar Pembobotan Kualitas Wakil Dekan FIAI UII



Gambar 4. 11 Grafik Tingkat Kematangan Wakil Dekan FIAI UII

1.6.5.3 Radar Pembobotan Kualitas Divisi Umum dan Rumah Tangga FIAI UII



Gambar 4. 12 Grafik Tingkat Kematangan Divisi URT FIAI UII

1.6.6 Tingkat Kematangan Fakultas Teknologi Industri

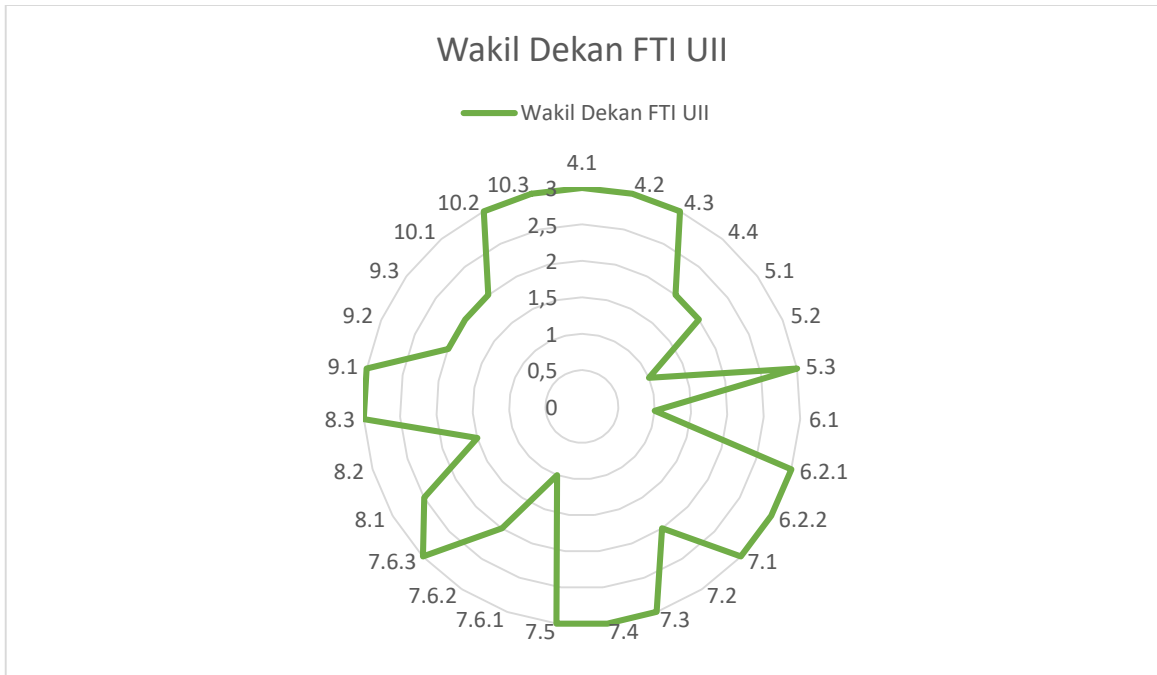
1.6.6.1 Pembobotan Tingkat Kematangan FTI UII

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai tingkat kematangan manajemen aset pada Fakultas Teknologi Industri UII. Maka diperoleh data pembobotan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Tabel 4.31 dan Gambar 4.13 serta Gambar 4.14 dibawah ini merupakan rekapitan data pada penelitian sebelumnya.

Tabel 4. 33 Tabel Pembobotan FTI

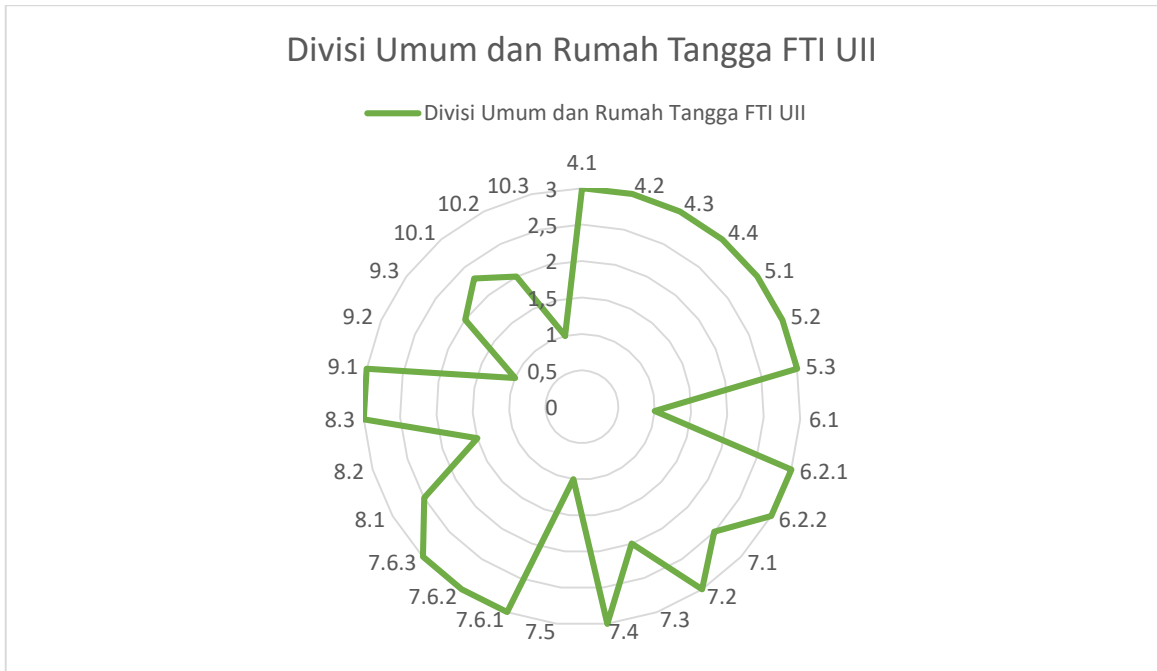
No.	Sub Klausul	Maturity Level	
		Wakil Dekan	Divisi Umum dan Rumah Tangga
1	4.1	3	3
2	4.2	3	3
3	4.3	3	3
4	4.4	2	3
5	5.1	2	3
6	5.2	1	3
7	5.3	3	3
8	6.1	1	1
9	6.2.1	3	3
10	6.2.2	3	3
11	7.1	3	2,5
12	7.2	2	3
13	7.3	3	2
14	7.4	3	3
15	7.5	3	1
16	7.6.1	1	3
17	7.6.2	2	3
18	7.6.3	3	3
19	8.1	2,5	2,5
20	8.2	1,5	1,5
21	8.3	3	3
22	9.1	3	3
23	9.2	2	1
24	9.3	2	2
25	10.1	2	2,3
26	10.2	3	2
27	10.3	3	1

1.6.6.2 Radar Pembobotan Kualitas Wakil Dekan FTI UII



Gambar 4. 13 Grafik Tingkat Kematangan Wakil Dekan FTI UII

1.6.6.3 Radar Pembobotan Kualitas Divisi Umum dan Rumah Tangga FTI UII



Gambar 4. 14 Grafik Tingkat Kematangan Divisi URT FTI UII

1.6.7 Tingkat Kematangan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan

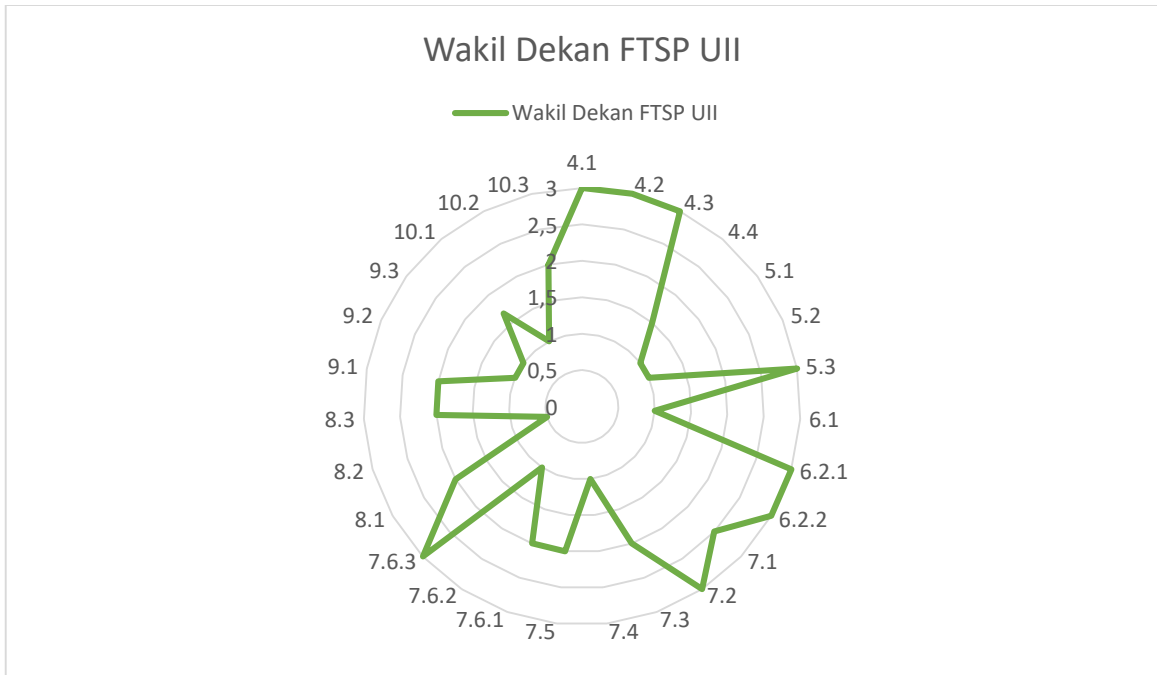
1.6.7.1 Pembobotan Tingkat Kematangan FTSP UII

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai tingkat kematangan manajemen aset pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII. Maka diperoleh data pembobotan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Tabel 4.34 dan Gambar 4.15 serta Gambar 4.16 dibawah ini merupakan rekapitan data pada penelitian sebelumnya.

Tabel 4. 34 Tabel Pembobotan FTSP

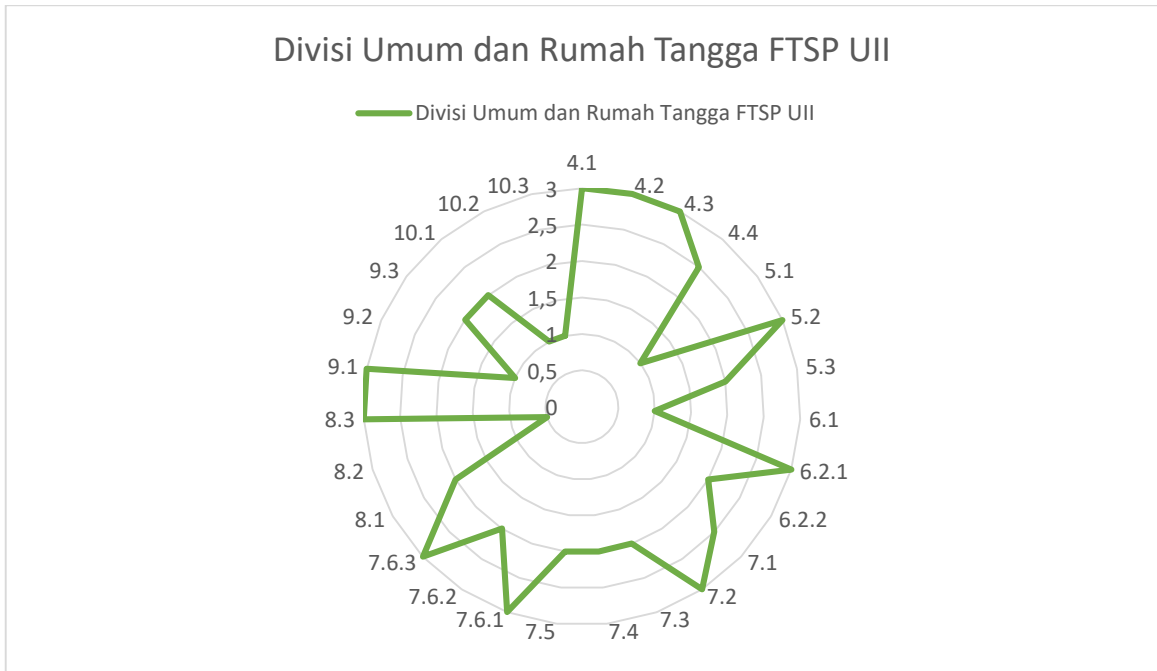
No.	Sub Klausul	Maturity Level	
		Wakil Dekan	Divisi Umum dan Rumah Tangga
1	4.1	3	3
2	4.2	3	3
3	4.3	3	3
4	4.4	1,5	2,5
5	5.1	1	1
6	5.2	1	3
7	5.3	3	2
8	6.1	1	1
9	6.2.1	3	3
10	6.2.2	3	2
11	7.1	2,5	2,5
12	7.2	3	3
13	7.3	2	2
14	7.4	1	2
15	7.5	2	2
16	7.6.1	2	3
17	7.6.2	1	2
18	7.6.3	3	3
19	8.1	2	2
20	8.2	0,5	0,5
21	8.3	2	3
22	9.1	2	3
23	9.2	1	1
24	9.3	1	2
25	10.1	1,67	2
26	10.2	1	1
27	10.3	2	1

1.6.7.2 Radar Pembobotan Kualitas Wakil Dekan FTSP UII



Gambar 4. 15 Grafik Tingkat Kematangan Wakil Dekan FTSP UII

1.6.7.3 Radar Pembobotan Kualitas Divisi Umum dan Rumah Tangga FTSP UII



Gambar 4. 16 Grafik Tingkat Kematangan Divisi URT FTSP UII

1.6.8 Tingkat Kematangan Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya

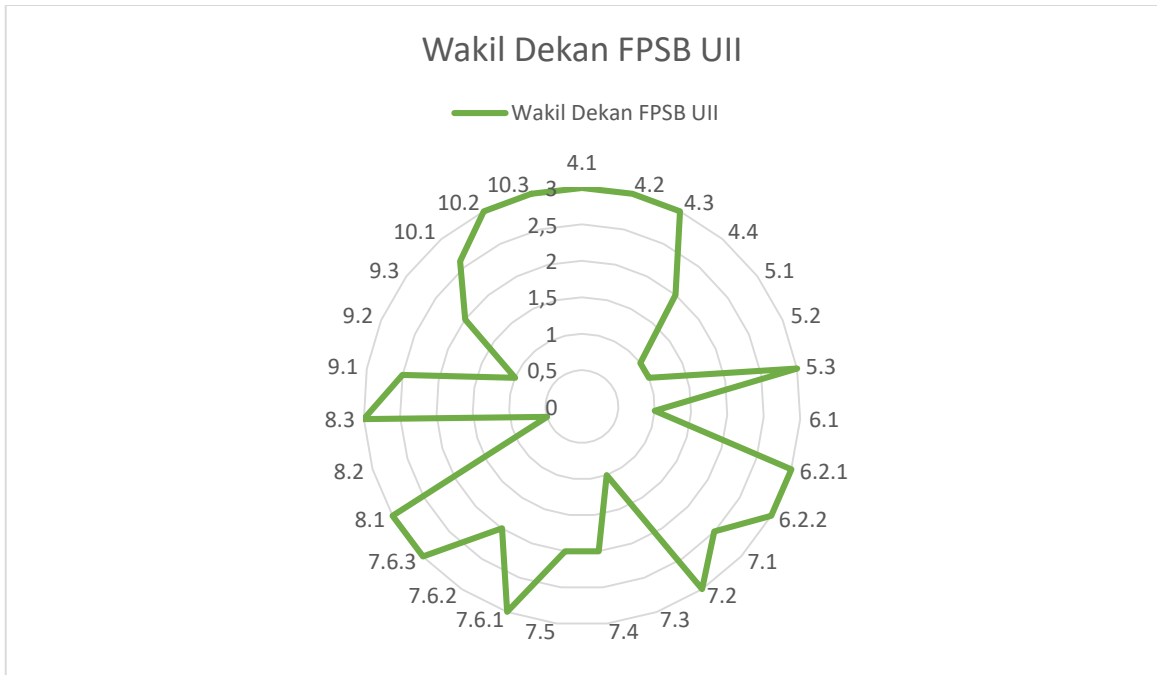
1.6.8.1 Pembobotan Tingkat Kematangan FPSB UII

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai tingkat kematangan manajemen aset pada Fakultas Psikologi dan Sosial Budaya UII. Maka diperoleh data pembobotan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Tabel 4.35 dan Gambar 4.7 serta Gambar 4.18 dibawah ini merupakan rekapan data pada penelitian sebelumnya.

Tabel 4. 35 Tabel Pembobotan FPSB

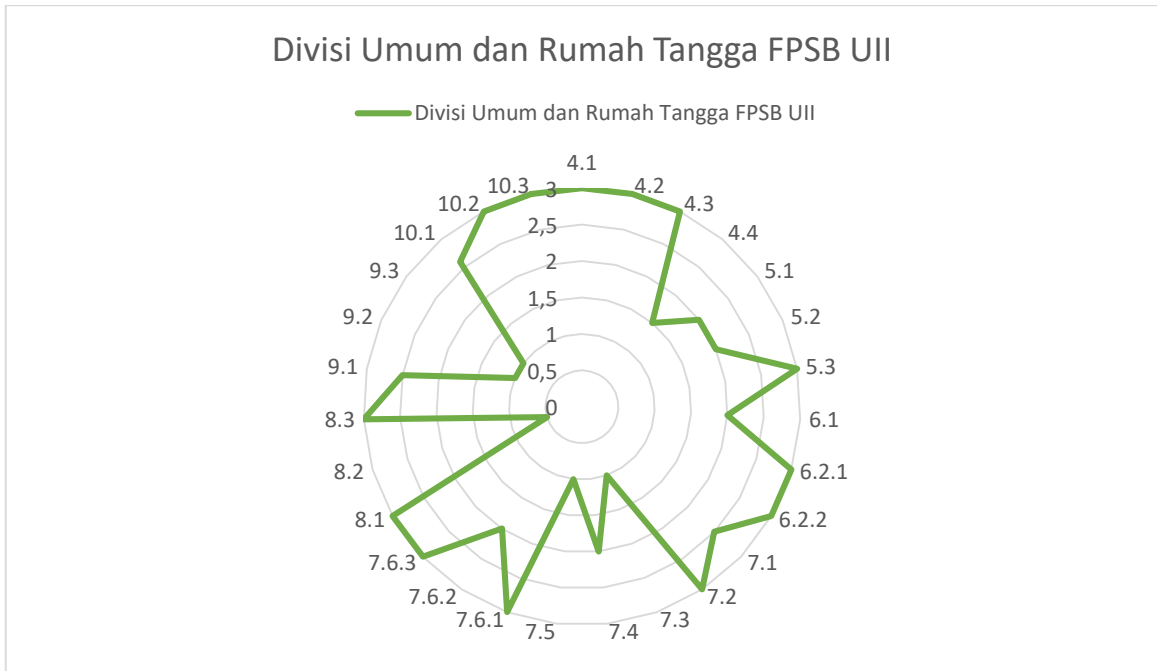
No.	Sub Klausul	Maturity Level	
		Wakil Dekan	Divisi Umum dan Rumah Tangga
1	4.1	3	3
2	4.2	3	3
3	4.3	3	3
4	4.4	2	1,5
5	5.1	1	2
6	5.2	1	2
7	5.3	3	3
8	6.1	1	2
9	6.2.1	3	3
10	6.2.2	3	3
11	7.1	2,5	2,5
12	7.2	3	3
13	7.3	1	1
14	7.4	2	2
15	7.5	2	1
16	7.6.1	3	3
17	7.6.2	2	2
18	7.6.3	3	3
19	8.1	3	3
20	8.2	0,5	0,5
21	8.3	3	3
22	9.1	2,5	2,5
23	9.2	1	1
24	9.3	2	1
25	10.1	2,6	2,6
26	10.2	3	3
27	10.3	3	3

1.6.8.2 Radar Pembobotan Kualitas Wakil Dekan FPSB UII



Gambar 4. 17 Grafik Tingkat Kematangan Wakil Dekan FPSB UII

1.6.8.3 Radar Pembobotan Kualitas Divisi Umum dan Rumah Tangga FPSB UII



Gambar 4. 18 Grafik Tingkat Kematangan Divisi URT FPSB UII

1.6.9 Tingkat Kematangan Fakultas Kedokteran

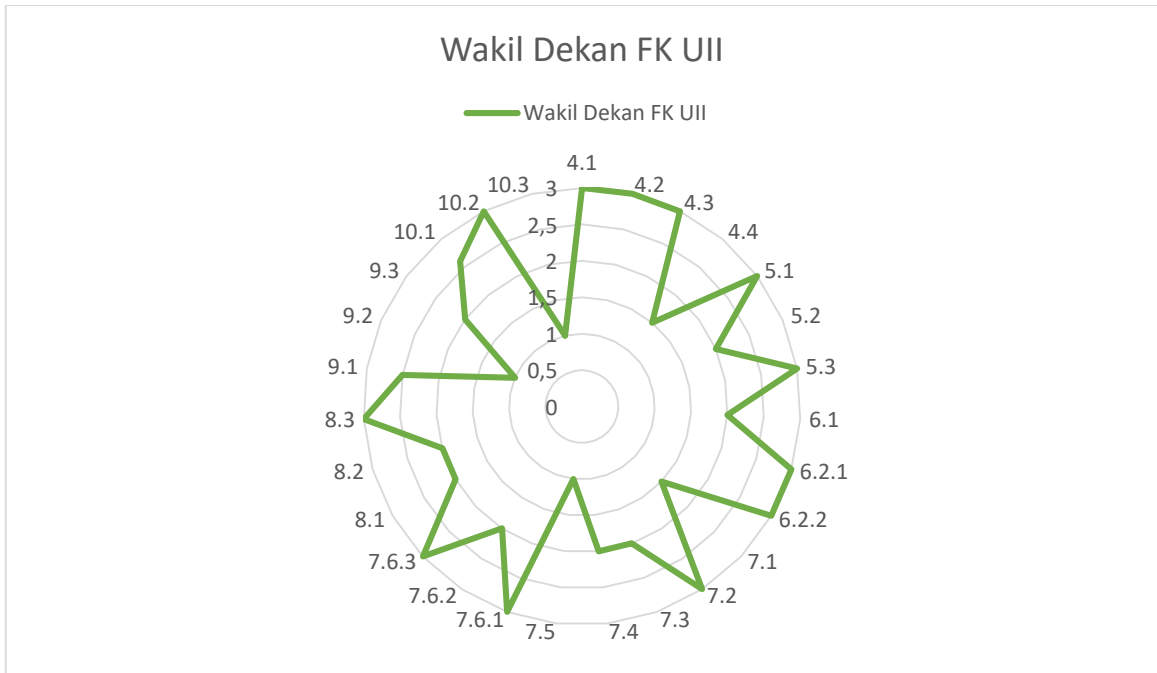
1.6.9.1 Pembobotan Tingkat Kematangan FK UII

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai tingkat kematangan manajemen aset pada Fakultas Kedokteran UII. Maka diperoleh data pembobotan yang dibutuhkan pada penelitian ini. Tabel 4.36 dan Gambar 4.19 serta Gambar 4.20 dibawah ini merupakan rekapan data pada penelitian sebelumnya.

Tabel 4. 36 Tabel Pembobotan FK

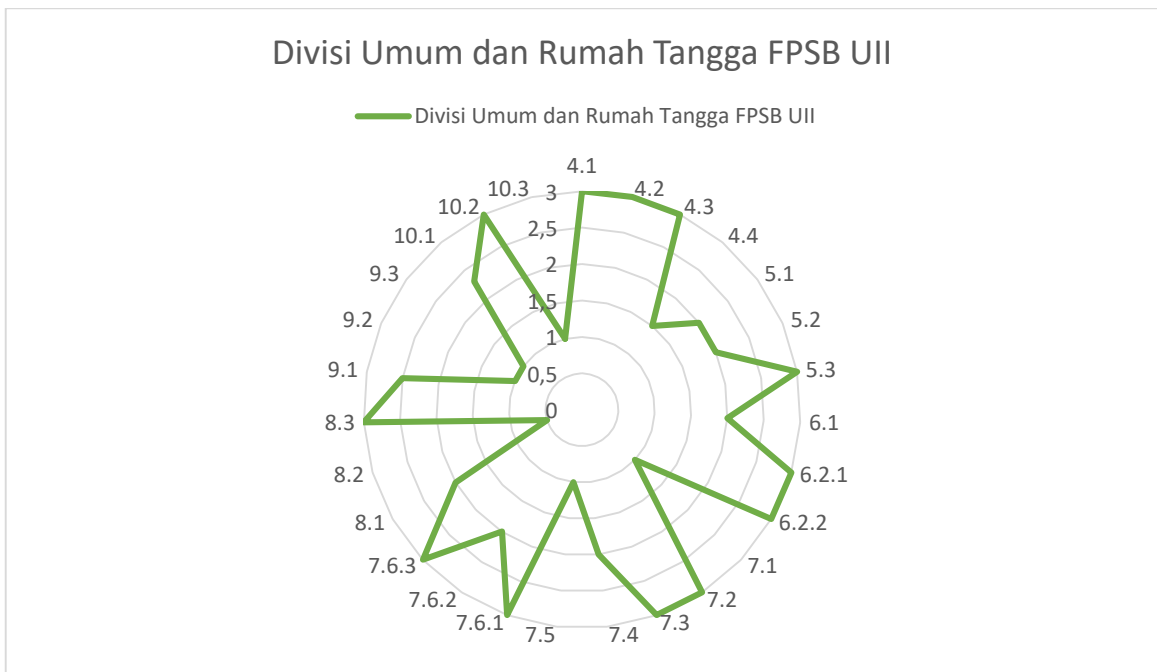
No.	Sub Klausul	Maturity Level	
		Wakil Dekan	Divisi Umum dan Rumah Tangga
1	4.1	3	3
2	4.2	3	3
3	4.3	3	3
4	4.4	1,5	1,5
5	5.1	3	2
6	5.2	2	2
7	5.3	3	3
8	6.1	2	2
9	6.2.1	3	3
10	6.2.2	3	3
11	7.1	1,5	1
12	7.2	3	3
13	7.3	2	3
14	7.4	2	2
15	7.5	1	1
16	7.6.1	3	3
17	7.6.2	2	2
18	7.6.3	3	3
19	8.1	2	2
20	8.2	2	0,5
21	8.3	3	3
22	9.1	2,5	2,5
23	9.2	1	1
24	9.3	2	1
25	10.1	2,6	2,3
26	10.2	3	3
27	10.3	1	1

1.6.9.2 Radar Pembobotan Kualitas Wakil Dekan FK UII



Gambar 4. 19 Grafik Tingkat Kematangan Wakil Dekan FK UII

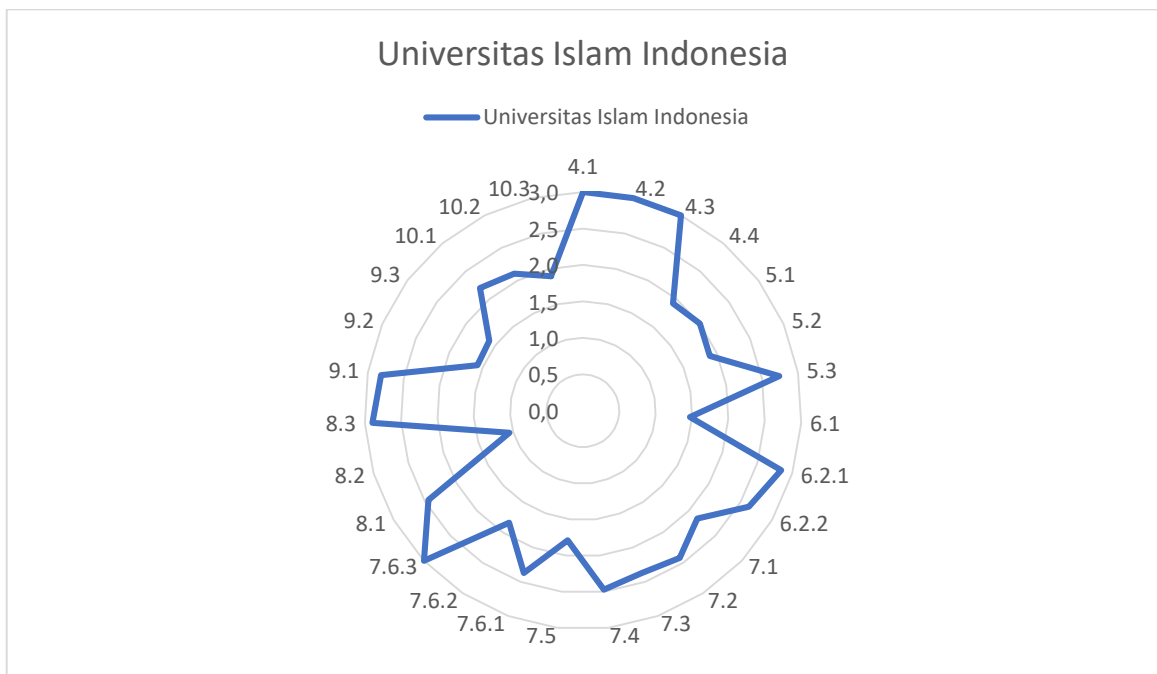
1.6.9.3 Radar Pembobotan Kualitas Divisi Umum dan Rumah Tangga FK UII



Gambar 4. 20 Grafik Tingkat Kematangan Divisi URT FK UII

1.7 Pengolahan Data Pokok

Untuk dapat dilakukan penilaian terhadap kualitas manajemen aset yang ada di universitas islam indonesia, maka dibutuhkan pokok dari segala tingkatan yang ada. Data pokok yang dimaksud pada penelitian ini merupakan data keseluruhan dari data utama dan data sekunder mencakup data pada tingkatan regulator atau badan wakaf hingga tingkatan pelaksana fakultas yaitu divisi umum dan rumah tangga. Data pokok ini digunakan sebagai gambaran keseluruhan tingkat kematangan sistem yang ada. Gambar 4.21 berikut merupakan penggabungan keseluruhan pembobotan berdasarkan klausul ISO 55001:2014.



Gambar 4. 21 Grafik Tingkat Kematangan Keseluruhan UII

Tingkat kematangan keseluruhan secara rata-rata adalah sebesar 2,3. Dengan angka tersebut maka dapat menggambarkan sistem yang ada di Universitas Islam Indonesia. data yang telah didapatkan selanjutnya akan menjadi acuan dalam penentuan langkah strategis selanjutnya agar sistem yang telah berjalan dapat dikembangkan sehingga mencapai sistem menejemen aset yang kompeten.